

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pemerintah Daerah Kota Bandung

Pemerintah Daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada pada posisi yang seimbang. Pengertian Pemerintah Daerah menurut Misdianti dan Kartasapoetra (1993:17) adalah “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah”

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemerintah pusat dimana unsur penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi yang berarti pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Amrah Muslimin dalam Ridwan, 2009: 16). Desentralisasi ini kemudian dibagi dua, yaitu desentralisasi territorial dan desentralisasi fungsional. Van Der Pot dan Donner (dalam Ridwan 2009: 16) berpendapat bahwa :

“Desentralisasi territorial (*territorial decentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (*otoom*), yang melahirkan badan-badan berdasarkan wilayah (*gebiedscorporaties*), sedangkan desentralisasi fungsional (*functionele decentralisatie*) adalah pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu, yang muncul dalam bentuk badan-badan dengan tujuan tertentu (*doelcorporaties*)”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan penyerahan wewenang pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal ini tampak bahwa Indonesia menganut desentralisasi territorial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Desentralisasi dalam pelaksanaannya harus berorientasi pada dasar negara yaitu Pancasila yang berarti demokrasi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Soewargono dalam Mahfud (1999 : 188) berpendapat bahwa dimensi filosofi, formulasi dan implementasi otonomi harus berorientasi pada :

“Pertama, realisasi dan implementasi demokrasi; kedua, realisasi kemandirian daerah; ketiga, membiasakan daerah untuk membiasakan diri dalam memanager permasalahan dan kepentingannya sendiri; keempat, menyiapkan *political schooling* untuk masyarakat; kelima, menyediakan saluran bagi aspirasi dan partisipasi daerah; dan keenam, membangun efisiensi dan efektifitas pemerintahan”.

Salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, pembangunan daerah juga tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat. Guna menyukseskan pembangunan dibutuhkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi, keterampilan tinggi, dan kemauan tinggi. Sehingga benar benar mampu menjadi inovator yang mampu menciptakan tenaga kerja yang burkualitas. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan. Sementara itu dengan pendapatan yang memadai, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan ekonomi akan meningkat. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, Daerah akan mampu untuk membuka peluang-peluang potensi ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut., apabila dikelola dengan secara optimal dapat menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan otonomi serta kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri akan terus meningkat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, selaras dengan azas sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut maka dapat diwujudkan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah. Adapun fungsi Pemerintah Daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993:20) adalah :

1. Fungsi Otonomi

Fungsi otonomi dari Pemerintah Daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatnya.

2. Fungsi Pembantuan

Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks.

4. Fungsi Lainnya

Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya yaitu

1. Pembinaan Wilayah
2. Pembinaan Masyarakat
3. Pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum

Dari fungsi Pemerintahan Daerah diatas memberikan gambaran bahwa fungsi pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan otonomi daerah, karena baik buruknya pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya maka akan sangat berdampak kepada besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Dikatakan pemerintahan daerah yang baik apabila fungsi dari pemerintahan daerah tersebut dilaksanakan dengan baik pula.

2.1.2 Peranan

Dengan perkembangan masyarakat modern saat ini yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka peran dan fungsi pemerintah saat ini berubah menjadi fungsi pelayanan atau melayani masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Rasyid dalam buku Makna Pemerintahan- Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan mengungkapkan sebagai berikut :

“Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi mencapai kemajuan bersama”. (Rasyid, 2000 : 13).

Pernyataan Osborne dan Gaebler yang diterjemahkan oleh Rasyid masih dalam buku yang sama mengungkapkan bahwa “Pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya“. (terjemahan Rasyid, 2000 : 192).

Samuel Edward Finer yang dikutip oleh Syafiie dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia mengartikan “government” sebagai public servant yakni pelayanan. Sehingga Samuel Edward Finer menyimpulkan bahwa kata “government” dapat memiliki arti :

1. Menunjuk kepada kegiatan atas proses pemerintah, yakni melakukan control atas pihak lain.
 2. Menunjuk kepada masalah-masalah Negara dalam kegiatan atau proses dijumpai.
 3. Menunjuk cara, metode, atau sistem dengan masa suatu masyarakat tertentu diperintah.
- (Syafiie, 2002 : 13).

Dari pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah yang demokratis saat ini lahir untuk melayani warganya karena itu tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat.

Di bentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintahan tidak hanya sebatas pelindung melainkan pelayan masyarakat. Rakyat tidak lagi harus melayani pemerintah seperti zaman kerajaan ataupun penjajahan namun justru pemerintah yang seharusnya melayani, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai tujuan negaranya. Van Poelje (dalam Hamdi, 1999 : 52) menjelaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Kaufman yang dikutip oleh Thoha dalam buku Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya menyebutkan tugas pemerintah sebagai berikut :

“Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi”. (dalam Thoha, 1995 : 101).

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid dalam buku Makna Pemerintahan-Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup :

Pertama, menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara cara kekerasan.

Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada tiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

Keempat, melakukan pekerjaan umum dan membereikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan sebagainya.

Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi Negara dan masyarakat.

Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

(Rasyid, 2000 : 13)

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid masih dalam buku yang sama menyatakan bahwa:

“Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. (Rasyid, 2000 : 59)

Menurut Suharto (2006:50) peranan merupakan :

“Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.”

Konsep tentang peran (*role*) menurut Komarudin (1994:768) dalam buku ensiklopedia manajemen yakni sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Berdasarkan penjelasan tersebut, peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Masoed (2005:30) dalam buku yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional karangan Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani bahwa:

“Peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut”

Berdasarkan penjelasan diatas, peranan yang melekat dalam diri individu harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menempatkan individu pada organisasi masyarakat.

Menurut Poewadarminta (1995:751) mendefinisikan “peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa.”

Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto (2004: 243), peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menentukan perilaku seseorang. Menurut Soekanto (2004:243) mendefinisikan:

“peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia menjalankan sesuatu peranan, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya”

Peranan menurut Soekanto (2004:245) terdapat tiga indikator dalam suatu peranan, yaitu tentang hak dan kewajiban, perilaku, serta tanggapan. Ketiga hal tersebut sangat menentukan bagaimana seseorang menjalankan peranannya. Hak dan kewajiban merupakan acuan seseorang dalam menjalankan peranan. Perilaku merupakan tindakan-tindakan seseorang berdasarkan norma dan etika dalam menjalankan peranan tersebut juga menentukan tindakan-tindakan seseorang dalam melaksanakan pembangunan.

Masyarakat akan memberikan kesempatan-kesempatan atas tindakan-tindakan tersebut. Masyarakat akan memberikan tanggapan-tanggapan atas peranan yang yang dilakukan oleh seseorang.

Berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah, belum menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi pemerintah daerah dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing pemerintah daerah dalam proses pembangunan fasilitas pariwisata, yang apabila peranan ini dijalankan oleh pemerintah daerah maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (*social circle*), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam masyarakat, dan juga perilaku pemerintah daerah yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*).Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap

tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kreabilitas.

3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran di daya gunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini di landaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancan untuk melayani masyarakat, sehingga padangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, duna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.

Dalam pemandangan seorang pakar politik David Easton sebagaimana dikutip oleh Anderson (1997) dan Dye (1981), Peran kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari :

“ Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan publik merupakan hasil ouput dari sistem. Seperti ilmu yang dipelajari dalam ilmu kebijakan public terdiri dari input,converation, dan output seperti berikut :

1. Input
2. Coveration
3. Output

input adalah masukan dari suatu kebijakan yang di hasilkan, dimana akan melahirkan output sebagai hasil dari suatu kebijakan tersebut setelah adanya converation (penggabungan) antara input (masukan) dan output (keluaran)”

Peran Strategi dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peran yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Grant (1999:21) Strategi memiliki tiga peran penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu :

a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan Strategi menentukan suatu pedoman, peraturan, dan kriteria yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Dengan kata lain, strategi dapat digunakan untuk membatasi alternatif keputusan yang akan diambil, dan dapat juga digunakan sebagai petunjuk untuk mengurangi usaha pencarian yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dari suatu masalah

b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi Strategi tidak hanya dapat digunakan untuk memperoleh konsistensi dalamn keputusan yang diambil dalam waktu yang berbeda tetapi untuk organisasi yang kompleks, strategi dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh konsistensi dalam keputusan yang diambil oleh berbagai departemen dan individu yang ada dalam organisasi.

c. Strategi sebagai target Konsep strategi akan digabungkan dengan visi dan misi untuk menentukan di mana perusahaan akan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian, strategi dapat juga berperan sebagai target perusahaan

Menurut Handoko, (2002 : 30) mengemukakan bahwa komunikasi adalah “proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain.”

Dalam memahami komunikasi, maka kita harus mengetahui apa saja indikator dalam mencapai komunikasi yang efektif. Menurut Lupiyoadi, (2006:75) indikator komunikasi agar efektif ada empat diantaranya :

1. Pemahaman, Merupakan suatu kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana yang disampaikan oleh komunikator. Dalam hal ini komunikasi dikatakan efektif apabila mampu memahami secara tepat. Sedangkan komunikator dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan secara cermat.

2. Kesenangan, Apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan ke dua belah pihak. Sebenarnya tujuan berkomunikasi tidaklah sekedar transaksi pesan, akan tetapi dimaksudkan pula untuk saling interaksi secara menyenangkan untuk memupuk hubungan insani.

3. Pengaruh pada sikap, Apabila seorang komunikasi setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan itu. Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di perkantoran. Dalam berbagai situasi kita berusaha mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain bersikap positif sesuai keinginan kita.

4. Hubungan yang makin baik, Bahwa dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Di perkantoran, seringkali terjadi komunikasi dilakukan bukan untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi sikap semata, tetapi kadangkala terdapat maksud implisit di sebaliknya, yakni untuk membina hubungan baik.

Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu komunikasi menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan.

2.1.3 Pengelolaan

Menurut Terry (2009:76) pengelolaan (*management*) merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sejalan dengan Terry, Oey Liang Lee dalam Suprpto (2009), juga mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas *human and national resources* (terutama *human resources*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

- a. Perencanaan (*Planning*), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki. Perencanaan dalam arti luas menurut Adisasmita (2011:22) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*), adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan. Menurut G.R. Terry (dalam Malayu S.P. Hasibuan, 2006:119) menyatakan bahwa: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006:118), pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

c. Pelaksanaan (*Actuating*), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian. Tjokroadmudjoyo (dalam Adisasmita, 2011:24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.

d. Pengawasan (*Controlling*), adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana. Sujamto (dalam Adisasmita, 2011:25) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan kenyataan yang sebenarnya dan semestinya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ranupandojo (1996:169) yang menyatakan bahwa pengendalian merupakan perbandingan antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, membuat koreksi-koreksi jika pelaksanaan berbeda atau menyimpang dari rencana.

Tujuan Pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan diri dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Tujuan Pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen diterapkan secara tepat, Afifuddin (2010:3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. menentukan strategi
- b. menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- d. menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- e. menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. menentukan ukuran untuk menilai
- g. mengadakan pertemuan
- h. pelaksanaan
- i. mengadakan penilaian
- j. mengadakan review secara berkala

k. pelaksanaan tahap berikutnya. Berlangsung secara berulang-ulang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak lepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

2.1.4 Pariwisata

Bila dilihat dari segi etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar,berulang-ulang atau berkali-kali.

The Association Internationale des Experts Scientifique du Tourisme (AIEST) dalam Suwarjoko (2007), mendefenisikan pariwisata sebagai keseluruhan hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan dan pertinggalan (*stay*) para pendatang, namun yang dimaksud pertinggalan bukan berarti untuk bermukim tetap.

Menurut Kodyat (2001:30) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Selanjutnya Burkart dan Medlik dalam Bram (2006:48) menjelaskan pariwisata sebagai suatu trasformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.

Sedangkan Wahab (2003:59) menjelaskan pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam

penyediaan lapangan kerja peningkatan penghasilan, standart hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.

Menurut Pendit (1994:78) dalam buku Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana itu menjelaskan jenis-jenis wisata tersebut terbagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. Wisata Budaya
2. Wisata Maritim atau Bahari
3. Wisata Cagar Alam
4. Wisata Konvensi
5. Wisata Pertanian
6. Wisata Buru
7. Wisata Ziarah

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa :

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarikwisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pariwisata memiliki berbagai macam bentuk kegiatan wisata yang dapat disesuaikan dengan minat ataupun kebutuhan wisatawan. Kegiatan wisata yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang mendatangkan manfaat tersendiri bagi masing-masing wisatawan.

Ada beberapa komponen pokok yang secara umum digunakan dalam memberikan batasan mengenai pariwisata, sebagai berikut:

a. *Traveler*, yaitu orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas.

b. *Visitor*, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya kurang dari setahun dan tujuan perjalanannya bukanlah untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari nafkah, pendapatan, atau penghidupan di tempat tujuan.

a. *Tourist*, yaitu bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak satu malam (24 jam) di daerah yang dikunjungi Apabila diperhatikan ketiga hal tersebut, maka pariwisata memiliki beberapa komponen penting yang terkandung di dalamnya, antara lain: *traveler*, *visitor* dan *tourist*, masing-masing komponen mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Obyek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial dan belum dapat dikatakan sebagai daya tarik wisata. Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah kepariwisataan sulit untuk dikembangkan. Selain itu, pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasarkan atas:

1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
3. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka.

4. Adanya saran dan prasarana untuk melayani para wisatawan yang hadir.
5. Obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.
6. Obyek wisata mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

Perkembangan suatu kawasan wisata juga tergantung pada apa yang dimiliki kawasan tersebut untuk dapat ditawarkan kepada wisatawan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari peranan para pengelola kawasan wisata. Yoeti (1996) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya industri sangat tergantung pada tiga A (3A), yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*) Atraksi wisata yaitu sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat, dinikmati dan yang termasuk dalam hal ini adalah: tari-tarian, nyanyian kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan lain-lain. *Tourism* disebut *attractive spontance*, yaitu segala sesuatu yang terdapat didaerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata.

Akseibilitas (*accessibility*), Aktifitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang sangat mempengaruhi keinginan seorang untuk melakukan perjalanan wisata. Unsur yang terpenting dalam akseibilitas adalah transportasi sehingga jarak menjadi dekat. Selain transportasi, yang berkaitan dengan akseibilitas adalah prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun, dan bandara. Prasarana ini berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Keberadaan sarana

transportasi akan mempengaruhi laju tingkat transportasi itu sendiri. Kondisi prasarana yang baik akan membuat laju transportasi optimal.

Fasilitas (*amenties*), pariwisata tidak akan terpisah dengan akomodasi perhotelan. Fasilitas wisata merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjunginya suatu daerah tujuan wisata. Adapun sarana-sarana penting yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata yaitu akomodasi penginapan, restoran, air bersih, komunikasi, hiburan, dan keamanan.

Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan. Dimana objek dan daya tarik wisata dapat menyukkseskan program pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai aset yang dapat dijual kepada wisatawan. Objek dan daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup dan sebagainya yang memiliki daya tarik dan nilai jual untuk dikunjungi ataupun dinikmati oleh wisatawan. Dalam arti luas, apa saja yang mempunyai daya tarik wisata atau menarik wisatawan dapat disebut sebagai objek dan daya tarik wisata.

Dalam kepariwisataan, menurut Leiper dalam Ismayati (2009:60), terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan kepariwisataan tersebut bisa terjadi yakni:

1. Wisatawan Adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan.
2. Elemen Geografi Pergerakan wisatawan berlangsung pada tiga area geografi, seperti berikut ini :
 - a. Daerah Asal Wisatawan (DAW),
 - b. Daerah Transit (DT),
 - c. Daerah Tujuan Wisata (DWT),
3. Industri Pariwisata

Elemen ketiga dalam kepariwisataan adalah industri pariwisata. Industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut.

Sebagai contoh, biro perjalanan wisata bisa ditemukan di daerah asal wisatawan. Penerbangan bisa ditemukan baik di daerah asal wisatawan maupun di daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.

Dari pendapat diatas dalam kepariwisataan terdapat tiga elemen utama yang menjadi kegiatan kepariwisataan yaitu wisatawan sebagai aktor dalam kegiatan wisata, elemen geografi dan industri pariwisata.

2.2 Kerangka Pemikiran

Permasalahan yang terjadi dalam peranan pengelolaan sektor pariwisata Kota Bandung dapat dilihat dari klasifikasi pemerintah yaitu sebagai fasilitator, regulator dan mediator kurang optimal sebagaimana mestinya, misalnya sebagai regulator Pemerintah Daerah sudah melahirkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Sebagai Mediator pemerintah daerah kurang merespon apa yang menjadi keinginan dan keluhan dari masyarakat terkait peningkatan sarana dan prasarana. Keinginan masyarakat dilokasi objek wisata tersedianya tempat parkir yang memadai, tempat duduk yang teduh dan nyaman, tempat untuk beribadah, toilet yang bersih, dan tempat makan yang murah dan terjangkau. Keluhan dari masyarakat yang sering dikemukakan yaitu kurangnya kebersihan, keamanan yang kurang terjamin dan kemacetan lalulintas menuju objek wisata.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti memilih mengambil teori dari Horoeopetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) yang mengemukakan bahwa dimensi peran menyangkut kepada Kebijakan, Strategi dan Komunikasi. Alasan peneliti menggunakan teori Horoeopetri, Arimbi dan Santosa karena menurut pandangan dari peneliti teori tersebut bersangkutan dengan permasalahan pemerintah

daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata Kota Bandung, oleh sebab itu diperlukan peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata di Kota Bandung.

Peranan juga dapat di artikan sebagai salah satu ke ikut sertaan dalam suatu sistem yang mempunyai fungsi dan bertanggung jawab dalam menjalan kan nya, peran salah satu hal penunjang dalam kemajuan suatu organisasi atau pun suatu instansi karena dimana peran itu mempunyai dua sisi positif dan negative yang bisa memajukan dan jagan bisa juga menghacurkan. Maka akan tercapainya kepuasan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung di karena kan oleh Peran Dinas Pariwisata Kota Bandung yang sangat memuaskann wisatawan yang datang ke Kota Bandung.

Berdasarkan paparan diatas, penyusun kemudian coba mengukur peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata Kota Bandung dengan pengukuran peranan di bawah ini, antara lain yaitu : Peranan sebagai suatu kebijakan. kebijakan adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan sektor pariwisata Kota Bandung tingkat pencapaian target dalam proses kerja yang dilaksanakan dalam proses Mengelola sektor pariwisata yang diukur dengan cara membandingkan hasil kerja yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yang dapat dinilai dalam indikator sebagai berikut:

Input adalah suatu masukan yang di terima oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berguna dalam menentukan kebijakan. input dapat berupa saran maupun pendapat yang dapat dijadikan suatu acuan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan sektor pariwisata Kota Bandung.

Coveration adalah suatu proses pengambungan dari input yang didapat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk di gabungkan yang menghasilkan output,

converation atau pengambungan adalah suatu keselarasan dalam meghasilkan suatu kebijakan dimana coveration sebagai penghubung dari masukan yang di buat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan digabung dengan output sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang yang relevan untuk di terapkan.

Output adalah hasil dari penggabungan input yang sudah di proses oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan sektor pariwisata Kota Bandung.

Peranan sebagai strategi adalah suatu pencapaian tujuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan pengelolaan sektor pariwisata Kota Bandung tercapai, yang dapat dinilai dalam indikator sebagai berikut:

Strategi pendukung adalah suatu elemen pendukung untuk pengambilan keputusan strategi yang di lakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sektor pariwisata Kota Bandung, Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan suatu kesatuan hubungan antar keputusan keputusan yang di ambil oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Strategi sebagai sarana kordinasi salah satu peran penting Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai sarana kordinasi untuk memberikan kesamaan arah bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata strategi sebagai target adalah konsep strategi akan digabungkan dengan visi dan misi untuk menentukan di mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi Dinas Kebudayaan dan Parwisata. Dengan demikian strategi

juga dapat memiliki peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai target pengelolaan sektor pariwisata Kota Bandung.

Peran sebagai alat komunikasi adalah proses penyampaian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan sektor pariwisata Kota Bandung untuk wisatawan dengan menggunakan alat-alat atau media yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu komunikasi untuk merubah sikap atau tingkah laku sejumlah orang ada efek tertentu yang di harapkan, yang dapat dinilai dalam indikator sebagai berikut:

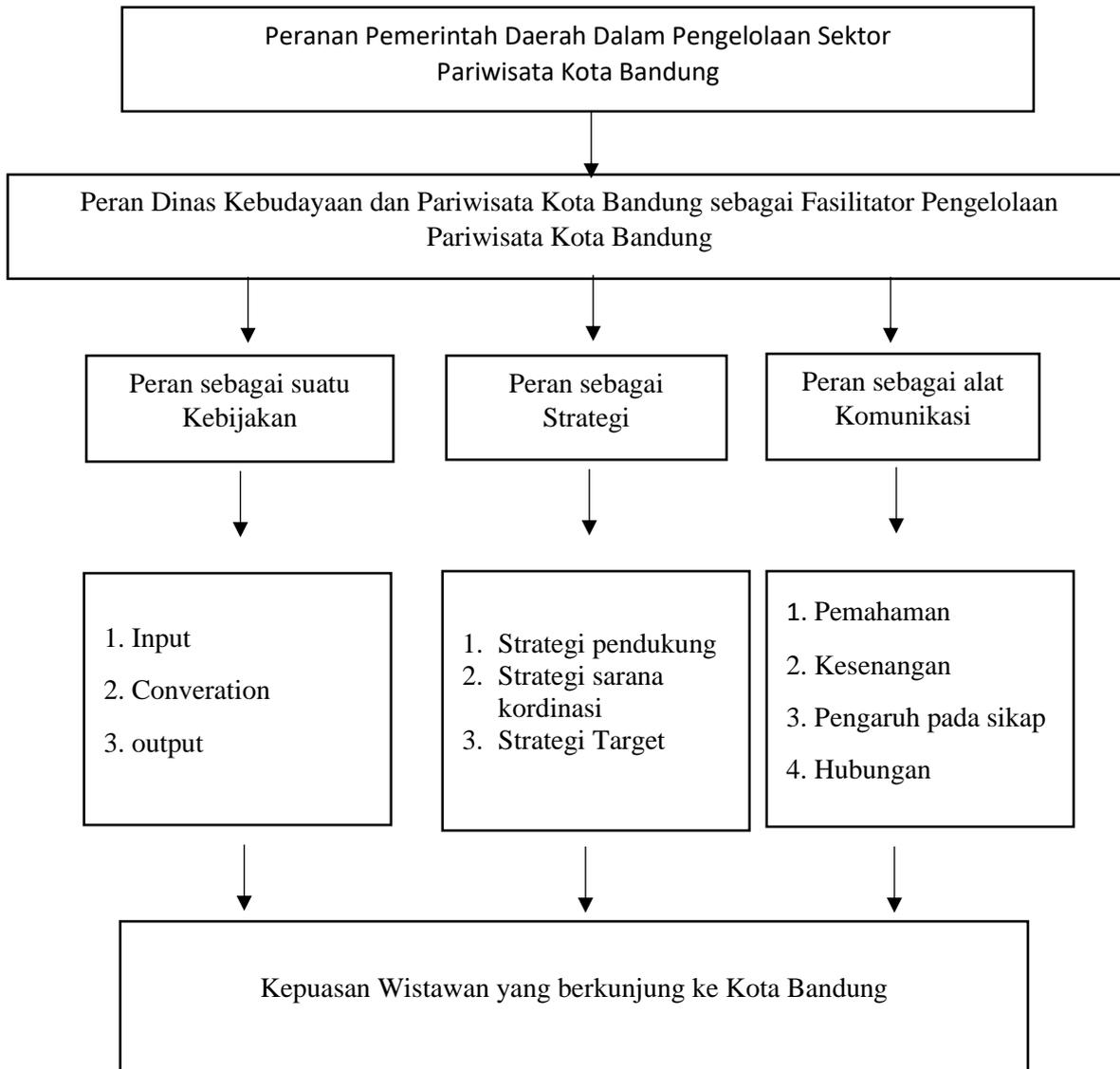
Komunikasi sebagai alat Pemahaman adalah suatu kemampuan memahami pesana secara cermat sebagai mana yang disampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke wisatawan. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan secara cermat. Komunikasi sebagai alat kesenangan adalah apabila proses komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berhasil menyapaikan Informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana menyenangkan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan wisatawan sehingga mendatangkan wisatawan untuk datang ke Kota Bandung di karenakan mendapatkan suatu kesenangan dalam berkomunikasi Komunikasi sebagai alat pengaruh pada sikap dimana komunikasi yang di lakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat mempengaruhi sikap wisatawan untuk datang ke Kota Bandung dikarenakan komunikasi yang baik demi mencapai target untuk mendatangkan wisatan yang lebih banyak ke Kota Bandung.

Komunikasi sebagai alat hubungan adalah dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Wisatawan secara interpersonal. Seringnya komunikasi

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan mempererat hubungan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Sebenarnya tujuan dari komunikasi adalah untuk menyenangkan ke dua belah pihak yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan wisatawan, pengaruh sikap adalah apabila setelah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan informasi dapat mempengaruhi wisatawan dengan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam berbagai situasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mampu berusaha agar wisatawan bersikap positif sesuai dengan yang ingin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, hubungan adalah proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan wisatawan. Menyampaikan informasi bukan hanya untuk mempengaruhi sikap semata kadang termaksud implisit dibaliknya, yakni untuk membina hubungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan wisatawan.

Untuk mempermudah dalam memahami kerangka berpikir penelitian, maka penyusun menyediakan ringkasan dalam bentuk model kerangka berpikir sebagai berikut :

Bagan II.1
Kerangka Pemikiran



2.1 Proposisi

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan proposisi dalam penelitian ini adalah Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Kota Bandung ditentukan oleh Dimensi peranan yaitu Kebijakan, Strategi dan Komunikasi.